

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.

Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terbesar di dunia, dimana Indonesia termasuk dalam lima besar

negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak di dunia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 adalah sebesar 210.241.999 jiwa dengan pertambahan penduduk sekitar 1,24 % (BPS). Laju pertambahan penduduk yang tinggi tersebut akan berpengaruh kepada tingkat kehidupan dan kesejahteraan penduduk.

Apabila diperbandingkan dengan negara maju, implikasi tingginya laju pertumbuhan penduduk akan lebih terasa di negara miskin, sebab pertambahan angkatan kerja sebagai akibat dari ledakan penduduk di negara miskin yang tidak diimbangi oleh semakin diperluasnya lapangan kerja justru akan menimbulkan angka pengangguran semakin tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang tidak saja berhenti pada upaya meringankan penderitaan penduduknya yang diakibatkan oleh kemiskinan absolut saja namun juga pada upaya pendistribusian bahan pangan dan pendapatan yang memadai sebagai perwujudan dari keberhasilan pembangunan ekonomi.

Saleh, A. (2012), Pembangunan ekonomi menurut Meier adalah proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita masyarakat. Lebih lanjut Mudrajad Kuncoro melengkapi pendapat tersebut dengan memberi batasan pada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurutnya pembangunan ekonomi baru akan dikatakan berhasil apabila pertumbuhan penduduk lebih kecil dari pada pertumbuhan pendapatan nasional.

Tingginya pendapatan nasional atau pendapatan daerah, tidak menjamin pendapatan perkapitanya juga tinggi. Hal ini terjadi karena faktor jumlah penduduk yang juga sangat menentukan tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Pendapatan Daerah Regional Bruto (PBRD) provinsi Lampung relatif cukup besar dibandingkan PDRB di wilayah Sumatera. PDRB Provinsi Lampung diatas PDRB Aceh, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2013 (Milyar rupiah).

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	33.103,08	34.704,82	36.487,88	38.012,97
2	Sumatera Utara	118.718,90	126.587,62	134.461,51	142.537,12
3	Sumatera Barat	38.862,14	41.293,35	43.925,82	46.640,24
4	Riau	97.735,60	102.665,96	106.298,73	109.073,14
5	Jambi	17.471,69	18.963,52	20.373,53	21.979,28
6	Sumatera Selatan	63.859,14	68.008,50	72.095,88	76.409,76
7	Bengkulu	8.339,75	8.878,82	9.464,83	10.053,31
8	Lampung	38.389,90	40.858,94	43.526,87	46.123,35
9	Bangka Belitung	10.884,95	11.592,89	12.257,11	12.905,01
10	Kepulauan Riau	41.075,86	43.809,83	46.796,68	49.667,22

Sumber : Pembangunan Daerah Dalam Angka (2013)

Namun pendapatan perkapita (PDRP atas dasar harga konstan per kapita) Provinsi Lampung justru berada diurutan kedua terbawah, karena jumlah penduduk provinsi Lampung yang besar dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Sumatera. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Pendapatan per kapita Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2009-2012 (Ribu rupiah).

No	Provinsi	2009	2010	2011	2012
1	Aceh	7.311,00	7.331,00	7.567,00	7.797,00
2	Sumatera Utara	8.662,00	9.111,00	9.661,00	10.175,00
3	Sumatera Barat	7.645,00	7.987,00	8.419,00	8.857,00
4	Riau	17.471,00	17.546,00	17.891,00	17.930,00
5	Jambi	5.378,00	5.622,00	5.983,00	6.283,00
6	Sumatera Selatan	8.236,00	8.534,00	8.972,00	9.361,00
7	Bengkulu	4.643,00	4.841,00	5.097,00	5.357,00
8	Lampung	4.810,00	5.026,00	5.313,00	5.601,00
9	Bangka Belitung	8.626,00	8.850,00	9.184,00	9.437,00
10	Kepulauan Riau	23.854,00	24.296,00	24.825,00	25.659,00

Sumber : Pembangunan Daerah Dalam Angka

Hal ini sejalan dengan hasil kajian pakar masalah kependudukan Tjiptoherijanto. P, (1997) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh keadaan penduduknya dikatakanya, penduduk mempunyai peran strategis dalam pembangunan. Sebab penduduk mempunyai peran ganda, yakni selain sebagai subyek, penduduk sekaligus juga berperan sebagai obyek dalam pembangunan. Sedangkan sebagai obyek, penduduk mempunyai arti sebagai konsumen atau penikmat hasil-hasil pembangunan.

Permasalahan kependudukan sebagai akibat pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya beban ketergantungan, angka beban ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia tidak produktif (penduduk di bawah usia 15 tahun dan penduduk usia diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun).

Angka beban ketergantungan di provinsi Lampung dari tahun 2011 mulai menurun, dimana pada tahun 2011 angka ketergantungan 50,91, pada tahun 2012 angka ketergantungan 50,44 %, dan pada tahun 2013 angka ketergantungan sebesar 50,10 %. Hal ini menunjukkan adanya peluang bonus demografi, dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif.

Bonus demografi bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Peluang memperoleh keuntungan ekonomis dari sumber daya manusia (SDM) berlimpah untuk meningkatkan produktivitas, tingkat pendapatan, dan konsumsi. Sebaliknya, menjadi ancaman karena kualitas SDM yang rendah, kemiskinan, dan pendidikan penduduk rendah. Bonus demografi harus didukung SDM yang berkualitas. Jika tidak, akan menjadi beban pembangunan.

Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menegaskan bahwa BKKBN diberi wewenang menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Karenanya kebijakan pengendalian penduduk adalah melalui pengaturan kelahiran.

Sejak pengesahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera, misi program KB semakin luas. Pengertian keluarga berencana menjadi suatu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Upaya penurunan kelahiran dilakukan melalui Gerakan Keluarga Berencana (KB) yang didalam perkembangannya diatur dalam UU No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Gerakan keluarga berencana tidak hanya sekedar bertujuan untuk menurunkan jumlah anak yang dilahirkan, tetapi mencakup pula tujuan yang lebih luas yaitu meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.

Menurut Purwanti (2003), ketercapaian penurunan angka pertumbuhan penduduk dapat dilihat melalui beberapa indikator, diantaranya jumlah dan laju perubahan penduduk yang terkendali, laju perubahan pasangan usia subur (PUS) yang tidak lebih besar daripada laju perubahan peserta KB dan TFR atau tingkat kelahiran total yang rendah.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung hasil Sensus Penduduk dari tahun 1971 sampai 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

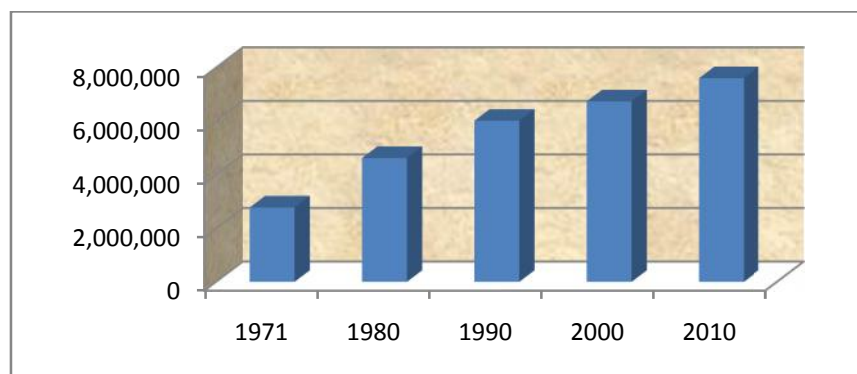
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Hasil Sensus Penduduk Tahun 1971-2010

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1971	2.777.008
1980	4.624.785
1990	6.017.573
2000	6.741.439
2010	7.608.405

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Dari Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa pertambahan penduduk Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari tahun 1971 sampai tahun 2010 sebanyak 4.831.397 jiwa, atau meningkat 3 kali lipat jumlah dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 1971. Adapun perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Hasil Sensus Penduduk Tahun 1971-2010.



Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Lampung sudah mencapai 7.608.405 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1,24 %. Bila dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, maka jumlah penduduk provinsi Lampung ini merupakan jumlah terbesar kedua di pulau Sumatera. Jumlah penduduk menurut

Provinsi di Pulau Sumatera Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk menurut Provinsi di Pulau Sumatera Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010.

No	Provinsi	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Aceh	4.486.570
2	Sumatera Utara	12.985.075
3	Sumatera Barat	4.845.998
4	Riau	5.543.031
5	Jambi	3.088.618
6	Sumatera Selatan	7.446.401
7	Bengkulu	1.713.393
8	Lampung	7.608.405
9	Bangka Belitung	1.223.048
10	Kepulauan Riau	1.685.698

Sumber : Pembangunan Daerah dalam Angka (Bappenas)

Pada tahun 2000, jumlah penduduk Provinsi Lampung sebesar 6.741.439. Berarti selama kurun waktu 2000-2010 terjadi pertambahan penduduk sebanyak 866.966 jiwa. Dengan demikian rata-rata pertambahan penduduk Provinsi Lampung per tahun sebanyak 86.697 jiwa, atau per bulannya terjadi pertambahan penduduk Provinsi Lampung sebanyak 7.225 jiwa

Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung Hasil Sensus Penduduk Tahun 1971 – 2010

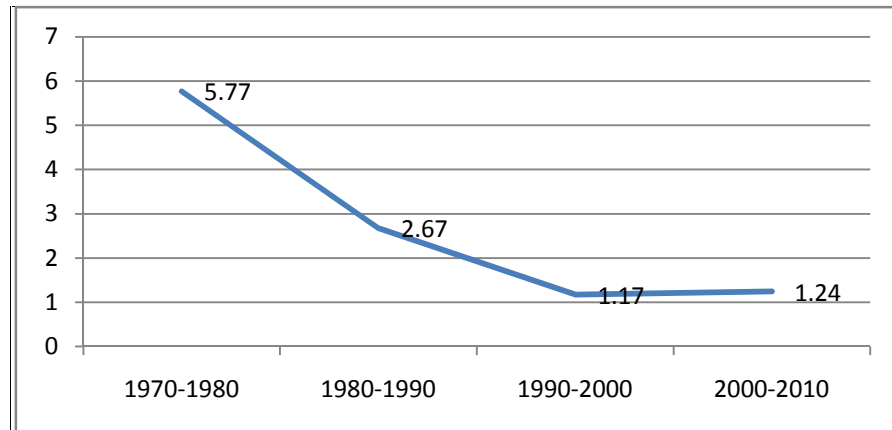
Tahun	LPP
1971-1980	5,77
1980-1990	2,67
1990-2000	1,17
2000-2010	1,24

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung dari tahun 1971-1980 sampai tahun 1990-2000 sempat mengalami penurunan dari 5,77 % hingga

mencapai 1,17 %, namun pada periode 2000-2010 mengalami peningkatan dari 1,17 % hingga mencapai 1,24 %.

Grafik 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 1970-2010



Namun demikian data kependudukan berdasarkan data Survey Demografi Kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 1991-2012 menunjukkan bahwa tingkat kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR) Provinsi Lampung sempat menunjukkan gejala menurun yakni pada tahun 1994 hingga 2007 dan pada tahun 2012 besaran TFR cenderung naik, dari 2,5 pada tahun 2007 menjadi 2,7 pada tahun 2012.

Tabel 1.6. Perkembangan TFR dan Tingkat Pemakaian Kontrasepsi Provinsi Lampung berdasarkan SDKI 1991-2012.

Tahun	Tingkat Kelahiran Total	Tingkat Pemakaian Kontrasepsi (%)
1991	3,20	59,42
1994	3,45	59,30
1997	2,91	66,50
2002	2,70	61,40
2007	2,50	71,10
2012	2,70	70,30

Sumber : Hasil SDKI

Oleh karena itu guna mengantisipasi ancaman ledakan penduduk telah diupayakan kebijakan pengendalian jumlah penduduk dan kebijakan penurunan



tingkat pertumbuhan penduduk yang dilakukan melalui gerakan peningkatan kesertaan ber-KB di Provinsi Lampung. Pengendalian jumlah penduduk dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR).

Menurut Eka L.D, ( 2011), Banyak faktor yang mempengaruhi fertilitas antara lain tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan usia kawin pertama. Keterkaitan pendapatan terhadap fertilitas adalah ketika pendapatan seseorang naik akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi.

Apabila ada kenaikan pendapatan, aspirasi orang tua akan berubah. Orang tua menginginkan anak dengan kualitas yang baik. Ini berarti biaya (*cost*) nya naik. Jadi biaya membesarkan anak lebih besar daripada kegunaannya. Hal ini mengakibatkan “*demand*” terhadap anak menurun atau dengan kata lain fertilitas turun.

Pengukuran tingkat pendapatan yang sering digunakan adalah pendapatan per kapita, atau PDRB atas dasar harga konstan/perkapita. PDRB atas Dasar Harga Konstan per kapita Provinsi Lampung tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7 PDRB atas Dasar Harga Konstan per kapita Provinsi Lampung Tahun 1991-2012.

Tahun	PDRB/kapita
1991	322.353
1994	893.108
1997	1.054.083
2002	3.680.630
2007	4.437.833
2012	5.555.221

Sumber : Pembangunan Daerah Dalam Angka

Menurut Eka L.D (2011), Penelitian mengenai kaitan pendidikan wanita dengan kesuburan di beberapa negara, mengungkapkan adanya kaitan yang erat antara tingkat pendidikan dengan usia kawin dan fertilitas. Semakin tinggi pendidikan semakin rendah fertilitas begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin besar fertilitasnya.

Pengukuran tingkat pendidikan yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung  
Tahun 1991-2012 (Tahun)

Tahun	Rata-rata lama sekolah (Tahun)
1991	5,90
1994	6,10
1997	6,20
2002	6,80
2007	7,17
2012	7,80

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Yuniarti, S. (2009), juga menggambarkan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran/fertilitas antara lain tingkat pemakaian kontrasepsi, rata-rata usia kawin pertama, dan *unmet need* (pasangan usia subur yang tidak ingin anak namun tidak ber-KB). Tingkat pemakaian kontrasepsi, rata-rata usia kawin pertama dan *unmet need* di Provinsi Lampung berdasarkan data SDKI tahun 1991-2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.9. Tingkat Pemakaian Kontrasepsi dan Rata-rata Usia Kawin Pertama di Provinsi Lampung, Hasil SDKI 1991-2012.

Tahun	Tingkat Pemakaian Kontrasepsi (%)	Rata-rata usia kawin pertama (Thn)	Unmet need (%)
1991	59,4	16,2	10,4
1994	59,3	16,9	10,7
1997	66,5	17,5	7,4
2002	61,4	18	7,3
2007	71,1	18,7	5,5
2012	70,3	19,7	7,9

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Banyak teori yang sudah dipaparkan mengenai hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan. Salah satunya adalah Malthus. Malthus meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya alam akan habis. Sehingga muncul wabah penyakit, kelaparan, dan berbagai macam penderitaan manusia.

Philip Hauser menganggap kemiskinan tercipta dari tidak optimalnya tenaga kerja dalam bekerja dikarenakan adanya ketidakcocokan antara pendidikan dan pekerjaan yang ditekuni. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk yang masuk ke pasar kerja sehingga memaksa pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan secepat-cepatnya walaupun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya akibat ketatnya persaingan dalam mencari kerja.

Kedua pemaparan ahli tersebut bermuara ke satu arah yakni jumlah penduduk yang besar sebagai penyebab timbulnya kemiskinan, Tinggi rendahnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh proses demografi yakni; kelahiran, kematian, dan migrasi. Tingkat kelahiran yang tinggi sudah barang tentu akan meningkatkan tingkat pertumbuhan penduduk. Namun demikian, tingkat kelahiran yang tinggi kebanyakan berasal dari kategori penduduk golongan miskin.

Tabel 1.10. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung  
Tahun 1991-2012 (Tahun)

Tahun	Tingkat kemiskinan (%)
1991	35,30
1994	33,80
1997	32,10
2002	24,91
2007	22,19
2012	15,65

Sumber : BPS Provinsi Lampung

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan secara parsial dan bersama sama terhadap tingkat pemakaian kontrasepsi
2. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan secara parsial dan bersama sama terhadap rata-rata usia kawin pertama.
3. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat pemakaian kontrasepsi dan rata-rata usia kawin pertama secara parsial dan bersama sama terhadap tingkat kelahiran total.
4. Seberapa besar pengaruh tingkat kelahiran total terhadap tingkat kemiskinan.

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh variabel tingkat pendidikan dan pendapatan secara parsial dan bersama sama terhadap tingkat pemakaian kontrasepsi

2. Menganalisis seberapa besar pengaruh variabel tingkat pendidikan dan pendapatan secara parsial dan bersama sama terhadap rata-rata usia kawin pertama.
3. Menganalisis seberapa besar pengaruh variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat pemakaian kontrasepsi dan rata-rata usia kawin pertama secara parsial dan bersama sama terhadap tingkat kelahiran total.
4. Menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat kelahiran total terhadap tingkat kemiskinan.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi tentang pengaruh variabel pendidikan dan pendapatan secara parsial dan bersama sama terhadap tingkat pemakaian kontrasepsi dan rata-rata usia kawin pertama.
2. Memberikan informasi tentang pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat pemakaian kontrasepsi dan rata-rata usia kawin pertama secara parsial dan bersama sama terhadap tingkat kelahiran total.
3. Memberikan informasi tentang pengaruh tingkat kelahiran total terhadap tingkat kemiskinan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk mengetahui mengapa fertilitas di suatu tempat bisa lebih rendah atau lebih tinggi, dapat digunakan variabel antara hasil klasifikasi Davis dan Blake dalam penelitian Iswarati (2009). Ada 11 variabel antara yang dapat berpengaruh langsung terhadap fertilitas, sedangkan faktor-faktor sosial ekonomi, bio sosial,

dan lain-lain hanya dapat berpengaruh secara tidak langsung. Sebelas variabel antara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Umur mulai hubungan kelamin
2. Selibat permanen: proporsi wanita yang tidak pernah mengadakan hubungan kelamin
3. Lamanya masa reproduksi sesudah atau diantara masa hubungan kelamin :
4. Abstinensi sukarela
5. Berpantang karena terpaksa (oleh impotensi, sakit, pisah sementara)
6. Frekuensi hubungan seksual
7. Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak disengaja
8. Menggunakan atau tidak menggunakan metode kontrasepsi:
9. Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh factor-faktor yang disengaja (sterilisasi, subinsisi, obat-obatan )
10. Mortalitas janin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak disengaja
11. Mortalitas janin oleh faktor-faktor yang disengaja

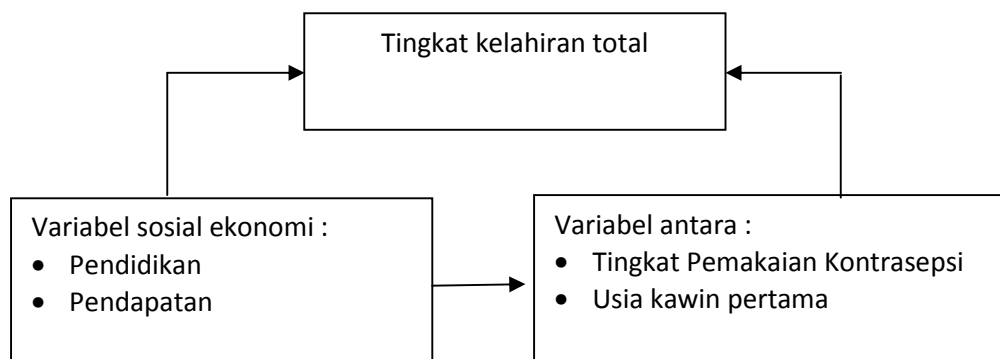
Kesebelas variabel antara itu digolongkan menjadi 3 kategori, antara lain variabel-variabel hubungan seks, (variabel 1-6), variabel-variabel konsepsi (variabel 7-9), dan variabel-variabel gestasi (wanita harus berhasil menyelesaikan masa kehamilan) yaitu variabel 10-11. Davis dan Blake mencoba menunjukkan bagaimana faktor-faktor lain melalui variabel-variabel ini dapat mempengaruhi fertilitas. Setiap variabel antara dapat mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap fertilitas, sebagai contoh, jika suatu masyarakat sedang menggunakan alat/cara KB, maka pengaruhnya terhadap fertilitas negatif. Sedangkan jika

alat/cara KB tersebut tidak digunakan, maka pengaruhnya positif terhadap fertilitas.

Nujum. S, (2011), Mengukur hubungan antara *variabel antara* dan fertilitas ternyata sulit, oleh karena itu untuk memudahkannya Bongaars menguranginya menjadi 8 variabel saja, misalnya dalam kerangka kerjanya variabel 1-3 dijadikan satu faktor, yaitu proporsi telah kawin. Disisi lain beberapa ahli ada yang mencoba menguraikan hubungan antara tingkat fertilitas dengan variabel-variabel lainnya. Salah satu ahli tersebut adalah R. Freedman, yang memberikan suatu model antara tingkat fertilitas dan keadaan sosial dengan norma-norma yang berlaku.

Model yang Freedman berikan bersumber dari pola pikir Davis dan Blake. Model yang diajukan oleh Freedman cenderung pada tingkat fertilitas yang terjadi pada suatu saat, kemudian diteliti faktor-faktor yang melatar belakangi kehidupan individu dan masyarakat setempat. Namun demikian dengan mempertimbangkan data yang tersedia dalam SDKI 2012 dan kerangka model dari Freedman, maka dapat dibuat skema hubungan kausal antara variabel sosial ekonomi dan variabel antara dengan fertilitas, seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema Hubungan antara Variabel Sosial Ekonomi dan Tingkat Kelahiran Total



## **F. Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga variabel pendidikan dan pendapatan secara parsial dan bersama sama berpengaruh terhadap tingkat pemakaian kontrasepsi.
2. Diduga variabel pendidikan dan pendapatan secara parsial dan bersama sama berpengaruh langsung terhadap usia kawin pertama.
3. Diduga variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat pemakaian kontrasepsi, dan rata-rata usia kawin pertama secara parsial dan bersama sama berpengaruh terhadap tingkat kelahiran total
4. Diduga tingkat kelahiran total berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan

## **G. Batasan Masalah**

Permasalahan penelitian dibatasi pada cakupan variabel penelitian dan waktu penelitian. Variabel penelitian dibatasi pada beberapa variabel hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang terdiri dari : *Total Fertility Rate* atau Tingkat kelahiran total, *Contracept Prevalensi Ratio* atau Tingkat Pemakaian Kontrasepsi, rata-rata usia kawin pertama, serta variabel sosial (tingkat pendidikan) dan variabel ekonomi yaitu tingkat pendapatan dan tingkat kemiskinan. Dari variabel sosial yang dijadikan variabel penelitian yaitu tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah), karena tingkat pendidikan ini merupakan center atau pusat yang mempengaruhi variabel lainnya, seperti sikap, pola pikir dan wasasan dan penguatuhuan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Sedangkan waktu penelitian dibatasi pada hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan data terkait lainnya antara tahun 1991-2012.